

Kesiapan Masyarakat Jawa Barat Dalam Penerapan Karantina Mandiri Bagi Pemudik

Muthya Diana

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat

e-mail: muthyadiana@jabarprov.go.id

Abstrak

Dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 yang disebabkan arus mudik, pemerintah menetapkan status pemudik sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan harus menjalani karantina mandiri. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kesiapan masyarakat Jawa Barat dalam menerima pemudik dan melaksanakan karantina mandiri. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Barat belum siap untuk melaksanakan kebijakan karantina mandiri bagi pemudik. Meskipun aspek pengetahuan dan perilaku masyarakat sudah berada pada kategori baik, namun aspek kondisi keluarga dan fasilitas tidak mendukung pelaksanaan karantina mandiri. Disarankan kepada pemerintah agar mengeluarkan kebijakan tegas yang melarang masyarakat untuk mudik selama pandemic Covid-19 dan untuk mengantisipasi pemudik yang tetap lolos ke wilayah Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat disarankan untuk lebih memperhatikan kesiapan penyediaan fasilitas karantina serta prosedur penanganan pemudik di tingkat Desa/Kelurahan.

Kata Kunci: Covid-19, Karantina Mandiri, Mudik

West Java Community Readiness In The Implementation Of Independent Quarantine For Travelers

Abstract

In an effort to prevent the spread of Covid-19 caused by the homecoming flow, the government has determined the status of travelers as People Under Monitoring (ODP) and must undergo self-quarantine. This survey aims to get a description of the people's readiness in accepting travelers and implementing self-quarantine. The results shows that the West Java's community are not ready to implement the self-quarantine policy for travelers. Although the knowledge and behavior aspects of the community are already in the good category, the aspects of family conditions and facilities do not support the implementation of self-quarantine. The government is advised to issue a strict policy prohibiting homecoming people during the Covid-19 pandemic and to anticipate travelers arriving in West Java, it is recommended that the Provincial Government pay more attention to the readiness of providing quarantine facilities and procedures for handling travelers at the Village level.

Keywords: Covid-19, Self-Quarantine, Homecoming

A. PENDAHULUAN

Sejak Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada 2 Maret 2020, dari hari ke hari jumlah yang terpapar virus tersebut terus bertambah. Secara nasional berdasarkan data per 3 April 2020, yang terpapar COVID-19 sebanyak 1.986 orang, sembuh 134 orang, dan meninggal dunia 181 orang (Merdeka, 2020).

Untuk menghambat penyebaran virus tersebut, Presiden RI telah meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan mengeluarkan kebijakan untuk bersekolah, beribadah dan bekerja dari rumah (Purnamasari, 2020). Mengingat Jakarta adalah episentrum penyebaran Covid-19 di Indonesia, maka Pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti kebijakan Presiden tersebut dengan menetapkan

status Tanggap Darurat Bencana Wabah Corona (COVID-19) di DKI Jakarta mulai 20 Maret sampai dengan 2 April 2020 dan kemudian memperpanjangnya hingga 19 April 2020 (Ikhsanudin, 2020).

Pemberlakuan kebijakan ini pada akhirnya berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Ekonom CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susanto sebagaimana dikutip Wulandhari (2020) menyatakan bahwa dampak paling parah diasumsikan terjadi pada pekerja sector informal, sebab daya tahan ekonomi para pekerja sector informal relatif rapuh, terutama yang bergantung pada penghasilan harian, mobilitas orang, dan aktivitas orang-orang yang bekerja di sector formal. Status pekerjaan yang diasumsikan akan mengalami dampak paling parah adalah pekerja bebas atau pekerja lepas, pengusaha mikro, berusaha sendiri dengan dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Hal ini dikuatkan dengan laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa sampai dengan 9 April 2020, sebanyak 1,4 juta pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK, dimana sebagian besar terjadi di wilayah Jakarta (Rina, 2020).

Kondisi ini kemudian memicu terjadinya percepatan arus mudik terutama dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju ke Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan DIY serta ke Jawa Timur. Disampaikan Presiden RI dalam rapat terbatas mengenai antisipasi mudik lebaran, tanggal 30 Maret, bahwa sebagai gambaran, tahun 2019 terjadi pergerakan kurang lebih 19,5 juta orang ke seluruh wilayah Indonesia. Jika Pemerintah Pusat dan Daerah tidak mengantisipasi Ramadhan dan Idul Fitri ini dengan baik, maka diprediksi akan terjadi penyebaran virus yang sangat massif dan dapat berakibat fatal bagi masyarakat. Terlebih sampai saat kajian ini dilakukan belum ada regulasi atau kebijakan dari Pemerintah Pusat yang secara tegas melarang masyarakat untuk mudik.

Menghadapi permasalahan hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian menetapkan status para pemudik sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan wajib menjalankan karantina mandiri selama 14 hari (Simbolon, 2020).

Mengingat pandemi ini merupakan kasus baru di dunia, maka dalam rentang Januari sampai

dengan awal April saat kajian ini dilakukan, belum banyak ditemukan hasil-hasil penelitian tentang Covid-19 dari aspek social dan administrasi. Beberapa yang dapat penulis temukan diantaranya adalah Shaw et al., (2020) dan Djalante et al., (2020). Shaw, Kim, & Hua menganalisis tanggapan di negara-negara Asia Timur, di Cina, Jepang dan Korea Selatan dimana hasil temuannya menunjukkan bahwa efektifitas kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19 akan berbeda, dipengaruhi oleh perilaku dan soliditas masyarakat. Sedangkan Djalante, dkk menulis tentang respon pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap Covid-19 berdasarkan analisis cepat dari konten media sosial, media massa, laporan dan pernyataan-pernyataan dari pemerintah. Antara lain dilaporkan bahwa keragu-raguan pemerintah bahkan penyangkalan terhadap potensi pandemik di Indonesia pada fase awal wabah menimbulkan respon dan persepsi masyarakat yang rendah tentang risiko COVID-19.

Berdasarkan hal tersebut, agar kebijakan Pemerintah Jawa Barat untuk memberlakukan karantina mandiri bagi para pemudik dapat terimplementasi dengan baik, maka pemahaman dan kesiapan masyarakat Jawa Barat sebagai tuan rumah bagi keluarganya yang mudik menjadi sangat penting untuk diketahui.

Pakar virus dari Universitas Brawijaya, dr. Andrew William Tulle, M.Sc sebagaimana dikutip (Nashikah, 2020) membeberkan cara atau pedoman yang tepat untuk karantina mandiri di rumah. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah tersedianya ruangan khusus atau kamar sendiri untuk pemudik untuk meminimalisir kontak dengan anggota keluarga lainnya. Selain itu perlu ada anggota keluarga yang khusus merawat atau membantu pemudik yang sedang isolasi diri tersebut dengan memperhatikan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Sedapat mungkin juga penggunaan kamar mandi dan alat mandi yang berbeda, alat makan yang terpisah, penggunaan disinfektan secara rutin pada area-area yang sering kontak dan penggunaan masker serta penerapan *hand hygiene* bagi seluruh anggota keluarga. Hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan disampaikan oleh Ahli gizi Dr. dr. Tan Shot Yen, M. Hum, sebagaimana dikutip oleh (Afifah, 2020).

Tulisan ini merupakan hasil kajian cepat yang dilaksanakan pada tanggal 14-16 April 2020, bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kesiapan masyarakat Jawa Barat dalam menerima pemudik serta mengimplementasikan kebijakan karantina mandiri dari aspek kondisi keluarga, ketersediaan sarana dan prasarana maupun dari aspek pengetahuan dan perilaku. Hasil kajian cepat ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menentukan kebijakan yang tepat guna mengantisipasi dan meminimalisir penyebaran Covid-19 akibat pergerakan penduduk menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H.

Dengan menggunakan metode survei, populasi kajian ini adalah seluruh rumah tangga yang ada di Jawa Barat yaitu 13.093.860 KK (Proyeksi 2019, BPS Jabar). Jumlah responden ditetapkan dengan rumus Slovin dengan margin of error 5%, sehingga diperoleh sampel responden sebanyak 400 KK. Teknik *probability sampling* yang digunakan, memberikan kesempatan kepada seluruh Kepala Keluarga di Jawa Barat untuk menjadi responden. Instrumen kuesioner dibuat dalam bentuk pertanyaan tertutup menggunakan Google Form dan disebarluaskan menggunakan

media sosial Facebook, Whatsapp, dan Instagram untuk kemudian dianalisis secara deskriptif.

B. PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaannya, responden yang berpartisipasi dalam survei ini mencapai 2.704 orang, namun setelah dilakukan pembersihan data, maka jumlah kuesioner yang diteruskan pada tahap pengolahan adalah sebanyak 1.032. Dengan demikian margin of error survei ini menjadi 3%. Data yang dibersihkan adalah data yang berasal dari responden yang berasal dari luar Jawa Barat dan responden yang pada tahun-tahun sebelumnya tidak menerima keluarga yang mudik.

Responden tersebut berasal dari seluruh kabupaten/Kota di Jawa Barat, terbanyak dari Kota Bandung (306 orang atau 30%) dan paling sedikit dari Kota Banjar (3 orang atau 0,3%). Sebagian besar berjenis kelamin laki-laki (56%), dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah Perguruan Tinggi (73%), sedangkan dari jenis pekerjaan, sebagian besar responden adalah pegawai pemerintah (48%). Rinciannya dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Jenis Kelamin (%)		Pendidikan yang ditamatkan (%)					Pekerjaan (%)			
Laki-laki	Perempuan	Tidak Tamat SD	SD	SMP	SMA	PT	Pegawai Pemerintah	Pegawai swasta	Wirausaha/ Pekerja Informal	Tidak Bekerja
56	44	0.1	0.5	1.9	24.7	72.8	48	25	12	15

Kesiapan masyarakat dalam hal ini diukur dari tiga aspek, yaitu kondisi keluarga, pengetahuan dan perilaku, serta ketersediaan fasilitas untuk isolasi mandiri.

Kondisi Keluarga

Pertanyaan pada aspek ini meliputi jumlah penghuni, adanya anggota keluarga yang beresiko tinggi, jumlah pemudik yang biasanya diterima dan kepemilikan tabungan untuk kondisi darurat.

Sebagian besar responden (68%) menyatakan bahwa rumah mereka dihuni oleh

lebih dari 4 orang. 52% responden juga menyatakan memiliki anggota keluarga yang beresiko tinggi terhadap Covid-19 (terdapat anggota keluarga yang berusia lanjut, mempunyai penyakit penyerta, ibu hamil dan anak dibawah 2 tahun). Selanjutnya, 59% responden biasanya menerima lebih dari 3 orang anggota keluarga yang mudik dan 49% menyatakan tidak mempunyai tabungan untuk keadaan darurat. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kondisi Keluarga dalam kesiapan menerima pemudik

Jumlah Penghuni (orang)		Memiliki anggota keluarga resiko tinggi		Jumlah pemudik yang biasa diterima (orang)		Kepemilikan tabungan darurat	
< 4	≥ 4	Ya	Tidak	≤ 3	>3	Ya	Tidak
32%	68%	52%	48%	41%	59%	51%	49%

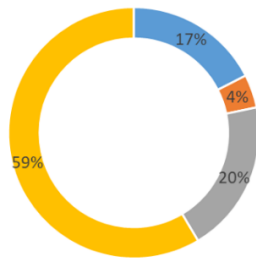
Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa rumah tangga di Jawa Barat mempunyai penghuni yang cukup banyak dan memiliki anggota keluarga yang beresiko tinggi terhadap infeksi virus corona. Dilain pihak, rata-rata tamu pemudik yang biasa diterima cukup banyak dan keluarga tidak memiliki cadangan dana yang bisa dipergunakan untuk kondisi darurat. Dengan demikian kondisi keluarga di Jawa Barat tidak mendukung untuk menerima dan melakukan isolasi mandiri bagi keluarga yang datang mudik.

karantina mandiri, pemahaman pentingnya karantina mandiri bagi pemudik, penggunaan masker, kebiasaan mencuci tangan dan penggunaan disinfektan.

Hasil survei menunjukkan sebagian besar responden sudah memahami apa yang dimaksud dengan karantina mandiri, ditandai dengan pilihan jawaban 59% responden bahwa pemudik harus tinggal dan melakukan aktivitas hanya di dalam rumah, menjaga jarak dengan anggota keluarga lainnya dan mempunyai ruangan tersendiri yang terpisah (lihat Diagram 1).

Pengetahuan dan Perilaku

Pertanyaan pada aspek ini meliputi pemahaman responden tentang definisi

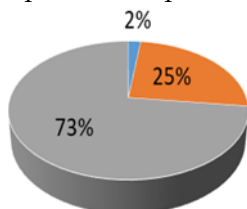


- Mereka harus tinggal dan melakukan aktivitas di rumah saja, tapi boleh keluar jika ada keperluan, misalnya untuk membeli bahan makanan dan obat-obatan.
- Mereka harus tinggal dan melakukan aktivitas hanya di dalam rumah dan di pekarangan, tapi tidak perlu menjaga jarak dengan anggota keluarga lainnya
- Mereka harus tinggal dan melakukan aktivitas hanya di dalam rumah serta menjaga jarak dengan anggota keluarga lainnya
- Mereka harus tinggal dan melakukan aktivitas hanya di dalam rumah, menjaga jarak dengan anggota keluarga lainnya dan mempunyai ruangan tersendiri yang terpisah

Diagram 1. Pemahaman Tentang Karantina Mandiri

Selanjutnya, 73% responden menyatakan bahwa karantina mandiri perlu dilakukan terhadap semua pemudik, baik yang tidak

bergejala sakit apalagi yang bergejala sakit (Diagram 2).



- Tidak perlu, mereka baik-baik saja. Karantina itu merepotkan
- Perlu bagi mereka yang menunjukkan gejala sakit, kalau yang sehat tidak perlu
- Harus dilakukan baik bagi yang sehat apalagi bagi yang sudah menunjukkan gejala sakit

Diagram 2. Pemahaman tentang Pentingnya Karantina Mandiri Bagi Pemudik

Dalam hal penggunaan masker, sebagian besar responden (80%) telah memiliki kebiasaan

menggunakan masker jika keluar rumah atau bertemu dengan orang lain (Diagram 3).

"Rekonstruksi Nilai serta Modal Manusia dalam Era New Normal untuk Membangun Kembali Daya Saing serta Keberlanjutan bagi Organisasi!"

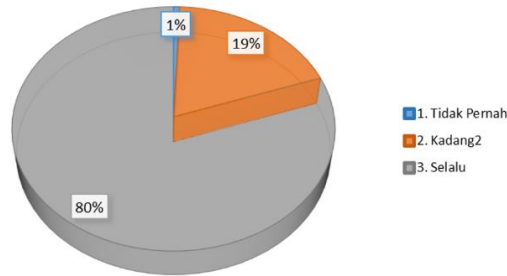


Diagram 3. Kebiasaan Penggunaan Masker

Sebagian besar responden (79%) telah memiliki pengetahuan tentang tata cara mencuci tangan dengan benar dan telah menerapkannya sebagai kebiasaan. Demikian juga dengan

penggunaan disinfektan untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah telah dipahami dan diterapkan oleh sebagian besar responden (60%) dalam kehidupan sehari-hari (Tabel 3).

Tabel 3. Pengetahuan dan Kebiasaan Mencuci Tangan dan Penggunaan Disinfektan

Pengetahuan tentang 6 langkah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir			Penggunaan disinfektan di rumah		
Ya, selalu diterapkan	Ya, kadang-kadang diterapkan	Tidak tahu	Ya, digunakan setiap hari	Ya, tidak digunakan setiap hari	Tidak punya
79%	20%	1%	60%	34%	6%

Berdasarkan data di atas, maka masyarakat Jawa Barat dari aspek pengetahuan dan perilaku dapat dikategorikan baik.

Fasilitas

Pada aspek ini, pertanyaan yang diajukan menyangkut ketersediaan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan karantina mandiri bagi pemudik, yaitu jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, memiliki rumah lain yang bisa dipakai keluarga yang mudik dan

fasilitas karantina yang disiapkan pemerintah/komunitas setempat.

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden (73.4%) menyatakan memiliki lebih dari dua kamar tidur, namun hanya 25,8% yang memiliki lebih dari dua kamar mandi. Sementara itu sebagian besar responden (85%) juga tidak memiliki rumah lain yang bisa digunakan oleh keluarga yang mudik dan 82% menyatakan belum tersedia fasilitas karantina yang disiapkan oleh pemerintah/komunitas setempat (Tabel 4).

Tabel 4. Ketersediaan Fasilitas dalam mendukung Karantina Mandiri bagi Pemudik

Jumlah kamar tidur		Jumlah kamar mandi		Kepemilikan rumah lain		Fasilitas karantina yang disiapkan pemerintah/komunitas	
≤ 2	>2	≤ 2	>2	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
27%	73%	74.2%	25.8%	15%	85%	18%	82%

Berdasarkan data di atas dan jika dikaitkan dengan aspek kondisi keluarga sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa fasilitas untuk mendukung pelaksanaan karantina mandiri bagi pemudik belum cukup tersedia.

Survei ini juga menunjukkan hasil yang sejalan antara karakteristik responden yang

sebagian besar adalah masyarakat dengan kategori berpendidikan tinggi serta bekerja sebagai pegawai pemerintah dengan pengetahuan dan perilaku responden yang bagus dalam upaya pencegahan Covid-19. Meskipun demikian, pegawai pemerintah yang dalam anggapan masyarakat secara umum adalah kelompok yang dikategorikan "mapan"

secara ekonomi, ternyata tidak didukung oleh kondisi keluarga dan fasilitas yang memadai untuk dapat melakukan karantina mandiri bagi keluarganya yang datang mudik.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Meskipun dari aspek pengetahuan dan perilaku masyarakat Jawa Barat sudah berada pada kategori baik, namun aspek kondisi keluarga dan fasilitas masih buruk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jawa Barat belum siap untuk melaksanakan kebijakan karantina mandiri bagi pemudik.

Hal-hal yang dapat disarankan dari survei adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan tegas yang melarang masyarakat untuk mudik selama pandemic Covid-19.
2. Untuk mengantisipasi pemudik yang tetap lolos ke wilayah Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat disarankan untuk lebih memperhatikan kesiapan penyediaan fasilitas karantina serta prosedur penanganan pemudik di tingkat Desa/Kelurahan.

REFERENSI

- Merdeka. (2020, April 3). Data Terkini Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia. <https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Data-Terkini-Jumlah-Korban-Virus-Corona-Di-Indonesia.Html>.
<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-terkini-jumlah-korban-virus-corona-di-indonesia.html>. Diakses 3 April 2020
- Nashikah, N. (2020). *Ini Cara Isolasi Diri di Rumah Bagi Pemudik Menurut Pakar Virus*. <https://www.beritabaik.id/read?editorialSlug=gaya-hidup&slug=1585637579827-ini-cara-isolasi-diri-di-rumah-bagi-pemudik-menurut-pakar-virus>. Diakses 25 Maret 2020
- Purnamasari, D. M. (2020). *Jokowi: Saatnya Kerja dari Rumah, Belajar dari Rumah, Ibadah di Rumah*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/15/14232961/jokowi-saatnya-kerja-dari-rumah-belajar-dari-rumah-ibadah-di-rumah>. Diakses 25 Maret 2020
- Rina, R. (2020). *Dampak Corona Update! 1,4 Juta Pekerja Dirumahkan & PHK, Jakarta Terbanyak*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200409201441-4-151017/update-14-juta-pekerja-dirumahkan-phk-jakarta-terbanyak>. Diakses 2 April 2020
- Shaw, R., Kim, Y., & Hua, J. (2020). Governance, technology and citizen behavior in pandemic: Lessons from COVID-19 in East Asia. *Progress in Disaster Science*, 6, 100090.
<https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100090>. Diakses 10 April 2020
- Simbolon, H. (2020). *Ridwan Kamil: Warga Jabar yang Telanjur Mudik Berstatus ODP dan Karantina Mandiri*. <https://www.liputan6.com/regional/read/4212621/ridwan-kamil-warga-jabar-yang-telanjur-mudik-berstatus-odp-dan-karantina-mandiri>. Diakses 29 Maret 2020
- Wulandhari, R. (2020). Pengangguran Sektor Informal Perlu Diwaspadai. <https://Republika.Co.Id/Berita/Q8vd67457/Pengangguran-Sektor-Informal-Perlu-Diwaspadai>. Diakses 16 April 2020
- Atifah, M. N. (2020). *Tinggal dengan Orang Karantina Mandiri Virus Corona, Begini Baiknya*. <https://health.kompas.com/read/2020/03/15/193000468/tinggal-dengan-orang-karantina-mandiri-virus-corona-begini-baiknya>. Diakses 28 Maret 2020
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6, 100091.
<https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>. Diakses 11 April 2020
- Ikhsanudin, A. (2020). *Isi Lengkap Kepgub Anies yang Tetapkan DKI Tanggap Darurat Corona*. <https://news.detik.com/berita/d-4947680/isi-lengkap-kepgub-anies-yang-tetapkan-dki-tanggap-darurat-corona>. Diakses 28 Maret 2020